

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Migrasi merupakan perpindahan orang dari daerah asal ke daerah tujuan. Keputusan migrasi didasarkan pada perbandingan untung rugi yang berkaitan dengan kedua daerah tersebut. Tujuan utama migrasi adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya, sehingga umumnya mereka mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi di daerah tujuan (Tjiptoherijanto, 2000).

Sejalan dengan definisi tersebut, Martin (2003) menyatakan migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi kedua daerah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non ekonomi. Berdasarkan pengelompokannya, maka faktor yang mendorong migran untuk migrasi dibedakan dalam tiga kategori, yaitu faktor *demand pull*, *supply push* dan *network*. Faktor *demand pull* terjadi jika ada permintaan tenaga kerja dari daerah tujuan, seperti tenaga kerja Meksiko yang direkrut untuk bekerja pada sektor pertanian di Amerika. Faktor *supply push* terjadi jika tenaga kerja sudah tidak mungkin lagi memperoleh pekerjaan di daerahnya sendiri, sehingga mendorong mereka untuk migrasi ke daerah lain. *Network factor* merupakan faktor yang dapat memberi informasi bagi migran dalam mengambil keputusan untuk migrasi.

Menurut Osaki (2003) migrasi penduduk terjadi karena adanya keperluan tenaga kerja yang bersifat hakiki (*intrinsic labor demand*) pada masyarakat industri modern. Pernyataan ini merupakan salah satu aliran yang menganalisis keinginan seseorang melakukan migrasi yang disebut dengan *dual labor market theory*. Menurut aliran ini, migrasi terjadi karena adanya keperluan tenaga kerja

tertentu pada daerah atau negara yang telah maju. Oleh karena itu migrasi bukan hanya terjadi karena *push factors* yang ada pada daerah asal tetapi juga adanya *pull factors* pada daerah tujuan.

Aliran *new economics of migration*, beranggapan migrasi penduduk tidak hanya berkaitan dengan pasar kerja saja, tetapi berkaitan juga dengan keputusan lingkungan terdekat migran, terutama keluarganya. Berbeda dengan keputusan individu, keputusan keluarga lebih mampu menangani resiko dalam rumah tangga pada saat migrasi dilakukan, yaitu melalui diversifikasi alokasi sumber daya yang mereka miliki, seperti alokasi tenaga kerja keluarga. Beberapa anggota keluarga tetap berada di daerah asal, sementara yang lain bekerja di daerah atau negara lain. Alokasi tersebut merupakan upaya untuk meminimalkan resiko kegagalan yang dapat terjadi akibat migrasi. Selain itu, jika pasar kerja lokal tidak memungkinkan anggota keluarga yang berada di daerah asal memperoleh penghasilan yang memadai, maka pengiriman uang (*remittances*) yang dikirim oleh anggota keluarga yang bekerja di luar daerah atau luar negara dapat membantu ekonomi rumah tangga (Stark, 1991).

Menurut Todaro (1998) migrasi internal sebagai proses alamiah yang menyalurkan surplus tenaga kerja di daerah pedesaan ke sektor industri modern di kota yang daya serap tenaga kerjanya lebih tinggi. Proses ini dipandang positif secara sosial, karena memungkinkan berlangsungnya suatu pergeseran sumberdaya manusia dari lokasi yang produk marjinal sosialnya nol ke lokasi yang produk marjinal sosialnya bukan hanya positif tetapi juga akan terus meningkat sehubungan dengan adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

Berdasarkan teori-teori tersebut terlihat bahwa tujuan utama migrasi adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya, sehingga masalah

migrasi masih dipandang sebagai suatu hal yang positif dalam pembangunan ekonomi. Fakta yang terjadi di negara berkembang berbeda dengan pandangan tersebut, dimana arus migrasi tenaga kerja dari pedesaan yang umumnya bekerja pada sektor pertanian jauh melampaui tingkat penciptaan atau penambahan lapangan pekerjaan khususnya sektor industri atau jasa-jasa layanan sosial di perkotaan.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga merupakan penyebab meningkatnya jumlah penduduk migran. Sektor industri yang merupakan salah satu faktor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi, menjadi faktor penarik bagi migran yang berharap mendapat kesempatan kerja yang lebih baik. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia, dimana Jawa yang merupakan daerah paling berkembang sektor industrinya dibanding daerah lain di Indonesia menjadi daerah tujuan utama migran luar Jawa untuk migrasi ke daerah tersebut.

Tabel 1 memperlihatkan jumlah industri dan pekerja yang tersebar pada pusat-pusat industri di Indonesia. Tabel tersebut memperlihatkan sekitar 90 persen jumlah industri pada pusat-pusat industri di Indonesia terdapat di pulau Jawa dan 42.7 persen diantaranya terdapat di Jawa Barat. Perkembangan industri ini mempengaruhi tumbuhnya kawasan bisnis dan jasa pendukung lainnya. Kondisi infrastruktur, transportasi, layanan publik, bisnis dan jasa di daerah tersebut terus membaik, sehingga keinginan migran dari luar Jawa untuk migrasi ke Jawa terus meningkat. Akibatnya jumlah migran yang datang ke pulau tersebut melebihi jumlah kesempatan kerja yang tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka migrasi tenaga kerja tidak dapat lagi mengatasi kelebihan permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Jawa.

Sebaliknya, migrasi dapat menyebabkan surplus tenaga kerja dan memperburuk masalah pengangguran di daerah tersebut.

**Tabel 1. Jumlah Industri dan Pekerja yang Tersebar pada Pusat-pusat Industri di Indonesia Tahun 2006**

Wilayah	Jumlah Industri		Jumlah Pekerja	
	Unit	Persen	Orang	Persen
Sumatera	900	8.49	225469	8.83
DKI Jakarta	1890	17.84	363901	14.25
Jawa Barat	4524	42.70	1269600	49.73
Jawa Tengah	567	5.35	171880	6.73
Jawa Timur	2539	23.96	502209	19.67
Sulawesi	176	1.66	20080	0.79
Total	10596	100.00	2553139	100.00

Sumber : Litbang Kompas, 2006 (diolah).

Lampiran 1 menunjukkan perkembangan migrasi internal yang terjadi di Indonesia yang terdiri dari migrasi masuk, migrasi keluar dan total migrasi selama periode 1980-2000. Lampiran tersebut memperlihatkan selama periode 1980 migrasi masuk terbanyak terdapat di DKI Jakarta dan Lampung, tetapi pada periode selanjutnya terdapat di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan migrasi keluar terbanyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi jika ditinjau dari migrasi bersih, maka jumlah migrasi terbesar terdapat di DKI Jakarta.

Sebagai suatu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran yang tinggi, maka migrasi tenaga kerja ke luar negeri (migrasi internasional) merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Migrasi internasional merupakan proses perpindahan penduduk suatu negara ke negara lain. Umumnya orang melakukan migrasi ke luar negeri untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Suatu fakta memperlihatkan bahwa pengangguran, upah yang rendah, prospek

karir yang kurang menjanjikan untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi dan resiko untuk melakukan investasi di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan migrasi ke luar negeri (Solimano, 2001).

Saat ini Indonesia dihadapkan pada masalah tenaga kerja, yaitu tingginya jumlah pengangguran. Kondisi ini terjadi karena jumlah penduduk usia kerja dan kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang terus meningkat akibat krisis ekonomi. Sekitar Februari 2005 dan 2006 penduduk usia kerja tumbuh dari 155.6 juta orang menjadi 159.3 juta orang atau bertambah 3.7 juta orang. Angkatan kerja meningkat dari 105.8 juta orang menjadi 106.3 juta orang atau bertambah 479 ribu orang. Jumlah pekerja meningkat dari 94.9 juta orang menjadi 95.2 juta orang atau meningkat sebanyak 229 ribu orang. Sementara jumlah penganggur meningkat dari 10.8 juta orang menjadi 11.1 juta orang atau bertambah 250 ribu orang (BPS, 2006). Melihat kondisi ini, pemerintah melalui menteri tenaga kerja berusaha untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Migrasi internasional merupakan fenomena menarik dalam mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia. Pada situasi tingkat pengangguran yang terus meningkat, Indonesia mendapatkan keuntungan dari mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Selain dapat mengatasi masalah pengangguran, pengiriman tenaga kerja migran juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan menambah devisa negara.

Negara-negara tujuan utama migran adalah Malaysia, Timur Tengah, Singapura dan Hongkong, dan sejak tahun 2005 terjadi penambahan permintaan tenaga kerja migran Indonesia ke Taiwan dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini terjadi karena terbukanya kesempatan kerja di negara-negara tersebut.

Tabel 2 memperlihatkan penempatan tenaga kerja migran Indonesia menurut kawasan tahun 2001-2006.

**Tabel 2. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Kawasan Tahun 2001-2006**

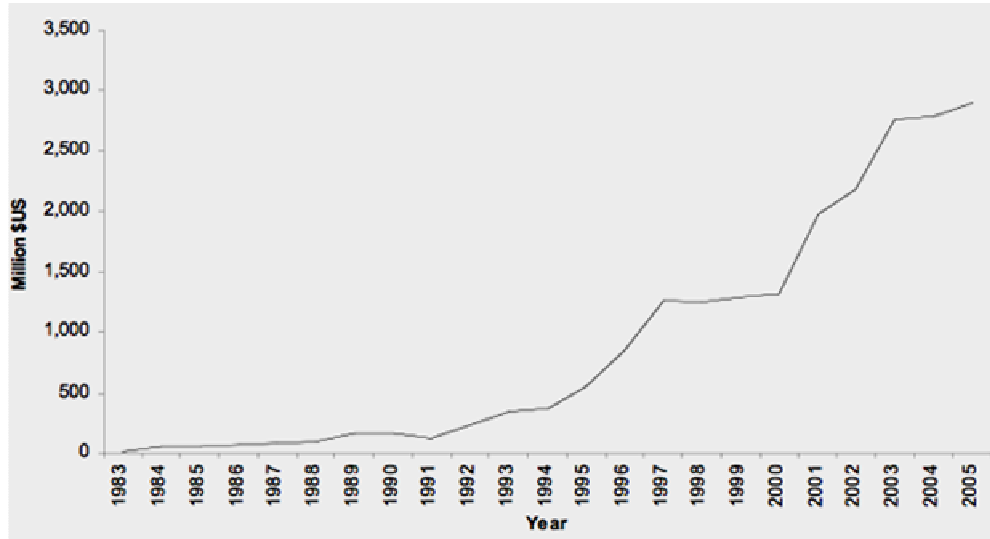
(Orang)

<b>Negara Tujuan</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Saudi Arabia	103235	213603	169038	203446	150235	307427
Malaysia	110490	152680	89439	127175	201887	270099
Singapura	34295	16071	6103	9131	25087	9075
Brunei	5773	8502	1146	6503	4978	2780
Hongkong	23929	20431	3509	14183	12143	13613
Jepang	1543	444	100	85	102	21
Korea	3391	4273	7495	2924	4506	3100
Taiwan	38119	35922	1930	969	48576	28090
Belanda	19	1268	30	3	0	0
Amerika Serikat	138	40	171	17	0	0
Negara lain	16267	26460	12730	16254	26796	45795
<b>Total</b>	<b>339200</b>	<b>481696</b>	<b>293694</b>	<b>380690</b>	<b>474310</b>	<b>680000</b>

Sumber: Depnakertrans, 2006.

Tabel 2 memperlihatkan adanya peningkatan pengiriman tenaga kerja migran dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh selain disebabkan oleh faktor pendorong, juga disebabkan oleh adanya faktor penarik. Faktor penarik dapat dilihat dari tingginya permintaan tenaga kerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri, khususnya tenaga kerja profesional. Tenaga kerja migran profesional yang dibutuhkan oleh negara tujuan adalah perawat dan pekerja pada restoran, tetapi hingga saat ini tenaga kerja migran internasional yang bersedia bekerja di luar negeri adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah.

Pengiriman tenaga kerja migran dalam jumlah besar akan memberikan sumbangan devisa yang besar bagi negara. Devisa ini diperoleh dari kiriman uang (*remittances*) tenaga kerja migran kepada anggota keluarganya yang meningkat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Gambar 1 memperlihatkan tahun 2005 jumlah *remittances* mencapai lebih dari 3 milyar dollar Amerika.



**Gambar 1. Jumlah *Remittances* Tenaga Kerja Migran untuk Indonesia Tahun 1983-2005**

Depnakertrans menargetkan tahun 2006 perolehan devisa dari kiriman uang tenaga kerja migran kepada keluarganya sebesar lima hingga tujuh milyar dolar Amerika. Jumlah ini lebih tinggi dibanding devisa selama tahun 2005 yaitu sekitar 3 milyar dolar Amerika yang berasal dari tenaga kerja migran yang dikirim ke 15 negara tujuan seperti Jepang, Taiwan dan Qatar. Tabel 3 memperlihatkan jumlah devisa yang diperoleh negara dengan pengiriman tenaga kerja migran selama tahun 2002-2005.

**Tabel 3. Penerimaan Devisa dari Tenaga Kerja Migran Indonesia Menurut Kawasan Tahun 2002-2005**

Kawasan	2002		2003		2004		2005	
	TKI (Orang)	Devisa (000 US \$)	TKI (Orang)	Devisa (000 US\$)	TKI (Orang)	Devisa (000 US\$)	TKI (Orang)	Devisa (000 US\$)
Asia Pasifik	238324	1812660.8	109722	834531.0	160970	1224316.5	297291	2628147.7
Amerika	40	221.8	171	948.0	17	119.7	0	0
Eropa	68	443.5	202	1317.5	4	123.8	0	0
TimTeng dan Afrika	241961	384693.7	183770	292175.8	219699	349229.9	177019	281386.5
Total	480393	2198019.8	293865	1128972.3	380690	1573789.9	474310	2909534.2

Sumber: Depnakertrans, Ditjen PPTKLN

## 1.2. Perumusan Masalah

Ketimpangan pasar kerja merupakan masalah utama dalam proses pembangunan di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi karena jumlah angkatan kerja di Indonesia jauh lebih besar dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat.

Migrasi dianggap sebagai suatu proses alamiah yang menyalurkan surplus tenaga kerja pada suatu daerah ke daerah yang tingkat daya serap tenaga kerjanya tinggi, khususnya daerah-daerah yang mempunyai sektor industri modern. Jawa yang merupakan salah satu daerah yang paling berkembang sektor industrinya di Indonesia menjadi daerah tujuan migran yang paling diminati oleh migran dari luar Jawa.

Ditinjau dari jumlah penduduk dan pengangguran, Jawa merupakan kawasan yang paling besar jumlah penduduk dan penganggurannya yaitu 60 persen dari total penduduk dan pengangguran di Indonesia terdapat di pulau tersebut. Namun kondisi ini tidak menurunkan keinginan penduduk di luar Jawa untuk migrasi ke Jawa. Tabel 4 memperlihatkan jumlah penduduk dan pengangguran di Indonesia berdasarkan pulau tahun 2001-2005.

**Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2001-2005**

Pulau	Penduduk (000 orang)		Pertumbuhan (%)	Pengangguran (000 orang)		Pertumbuhan (%)
	2001	2005		2001	2005	
Sumatera	39139	46294	3.4	1461	2147	8.0
Jawa	121621	127793	1.0	5227	6884	5.7
Kalimantan	11117	12583	2.5	299	428	7.4
Sulawesi	14600	15998	1.8	619	856	6.7
Pulau Lain	15154	16536	1.8	398	561	7.1

Sumber : Badan Pusat Statistik 2001-2005



Kondisi yang diperlihatkan pada Tabel 4 memperkuat asumsi Todaro yang menyatakan migrasi merupakan fenomena ekonomi, dimana keputusan untuk migrasi merupakan keputusan yang rasional. Para migran tetap migrasi ke daerah tujuan, meskipun pengangguran cukup tinggi di daerah tersebut. Tindakan ini dilakukan mereka karena alasan yang kuat yaitu adanya perbedaan upah dan pendapatan antara daerah asal dan daerah tujuan. Para migran selalu membandingkan dan mempertimbangkan pasar tenaga kerja yang tersedia bagi mereka di daerah asal dan daerah tujuan. Kemudian akan memilih salah satunya jika dapat memaksimumkan keuntungan (Todaro, 1998).

Ditinjau dari sisi upah yang berlaku pada masing-masing pulau di Indonesia, asumsi tersebut belum sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 5 yang menunjukkan rata-rata upah/gaji bersih pekerja selama sebulan menurut pulau di Indonesia.

**Tabel 5. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Selama Sebulan Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2002-2006**

Pulau	Upah/Gaji (Rp/Bulan)					Pertumbuhan (persen)
	2002	2003	2004	2005	2006	
Sumatera	711585	754925.3	798265	784945	870985	4.1
Jawa	753265	751181.6	749100	755550	802885	1.3
Kalimantan	908281	927990.5	947700	975145	1021670	2.4
Sulawesi	623080	742939.2	862800	739025	803015	5.2
Pulau Lain	678670	797556.7	916440	903890	949305	6.9

Sumber : Badan Pusat Statistik 2002-2006

Tabel 5 memperlihatkan rata-rata upah tertinggi terdapat di Kalimantan. Sedangkan rata-rata upah di Jawa lebih rendah dibandingkan dengan upah yang berlaku di luar Jawa, tetapi Jawa tetap menjadi daerah tujuan utama para migran di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian untuk melihat faktor apa

yang mempengaruhi penduduk dari pulau-pulau lain di luar Jawa migrasi ke Pulau Jawa.

Kenyataan ini memperlihatkan migrasi internal khususnya migrasi masuk ke Jawa dapat menyebabkan surplus tenaga kerja dan meningkatkan masalah pengangguran di pulau tersebut. Oleh karena itu beberapa kebijakan telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi masalah terkonsentrasinya penduduk di Pulau Jawa, terutama pasca kemerdekaan. Kebijakan tersebut adalah undang-undang yang mengatur penyelenggaraan transmigrasi (Undang-Undang Nomor 29/1960 tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi, yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang nomor 3/1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi dan Undang-Undang Nomor 15/1997 tentang ketransmigrasian). Pada Undang-Undang Nomor 29/1960 lebih menitik beratkan pada jenis penempatan transmigrasi spontan secara teratur dalam jumlah yang besar. Undang-Undang Nomor 3/1972 menitikberatkan pada penempatan penduduk di wilayah-wilayah strategis, dan adanya berbagai sanksi atas pelanggaran perundang-undangan sebagai pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 15/1997 berorientasi pada pengaturan pemukiman dan lahan, serta memperbaiki sarana jalan dan transportasi di daerah tujuan (Warsono, 2004).

Kebijakan migrasi yang berjalan hingga saat ini merupakan kebijakan bersifat *direct policy* yang mengatur perpindahan penduduk berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Tetapi hingga saat ini kebijakan tersebut belum mampu mengatasi masalah distribusi penduduk tersebut, yang terlihat dari tingginya jumlah migran masuk ke Jawa dibanding jumlah migran keluar dari pulau tersebut.

Satu hal yang memungkinkan dalam mengatasi masalah pengangguran yang semakin tinggi adalah meningkatkan migrasi internasional. Seperti halnya migrasi internal, motif utama migrasi internasional juga ekonomi. Rendahnya tingkat upah dan kesempatan kerja di dalam negeri merupakan pendorong migrasi tenaga kerja ke luar negeri khususnya ke negara kaya dan negara industri yang mempunyai kesempatan kerja dan upah yang lebih tinggi.

Syahriani (2007) menyatakan banyak faktor yang memotivasi para pekerja Indonesia memilih bekerja di luar negeri diantaranya peluang kerja yang terbatas, upah yang rendah, dan kemiskinan mendorong seseorang meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Para migran ini pergi ke negara tujuan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding negara asalnya.

Berbeda dengan migrasi internal, dalam migrasi internasional, para migran tidak dapat memutuskan dengan bebas dalam mencari pekerjaan di negara tujuan. Tetapi negara tujuan yang memutuskan menerima migran tersebut sesuai kebutuhannya. Negara tujuan dapat memilih tenaga-tenaga ahli dan terampil yang sedang dibutuhkan. Hal ini merupakan keuntungan ekonomi bagi negara tujuan. Keuntungan ekonomi bagi negara asal adalah berkurangnya tekanan terhadap pasar kerja di dalam negeri, dan sumber penerimaan devisa melalui kiriman uang mereka kepada keluarganya (Solimano, 2001).

Dampak positif dari migrasi tenaga kerja ke luar negeri adalah berkurangnya tekanan terhadap pasar kerja di dalam negeri. Dampak tersebut semakin dirasakan karena tenaga kerja tersebut adalah penganggur atau mereka yang bekerja sebelum berangkat ke luar negeri tetapi pekerjaannya dengan mudah

dapat digantikan oleh penganggur atau setengah menganggur yang ada pada pasar kerja dalam negeri.

Salah satu masalah dalam migrasi internasional yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah belum mampunya pemerintah memenuhi permintaan luar negeri terhadap tenaga kerja profesional, karena hingga saat ini sebagian besar tenaga kerja migran yang bersedia bekerja ke luar negeri didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah. Umumnya mereka bekerja pada sektor informal sebagai pembantu rumah tangga, buruh di perkebunan atau sopir. Sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi lebih banyak memilih untuk bekerja di dalam negeri.

Beberapa kebijakan juga telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam migrasi internasional. Mulai dari undang-undang penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran (Undang-Undang RI Nomor 39/2004, Keputusan Presiden RI Nomor 29/1999, dan Keputusan Menakertrans RI Nomor: Kep-104 A/Men/2002), pembekalan keterampilan hingga pengenalan budaya dan bahasa negara tujuan migran (Peraturan Menakertrans RI Nomor: Per.04/Men/II/2005, Keputusan Menakertrans RI nomor: kep-80/Men/V/2004). Secara umum tujuan kebijakan tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja migran internasional. Secara khusus tujuannya untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri, dan meningkatkan devisa negara melalui *remittances* mereka kepada keluarganya.

Salah satu tahapan sederhana dalam memahami pentingnya fenomena migrasi adalah memaklumi bahwa setiap kebijakan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan riil penduduk baik secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi proses migrasi. Selanjutnya migrasi juga akan mengubah pola-

pola kegiatan ekonomi, dan mengubah pola distribusi pendapatan penduduk. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Stark (1982); Stark dan Bloom (1985), yaitu migrasi memberi jalan yang lebih baik bagi kehidupan rumah tangga migran, yang terlihat dari pengiriman uang untuk anggota keluarganya. Hal ini tidak dapat diabaikan dalam perkembangan ekonomi, karena pengiriman uang tersebut menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Kondisi ini dapat meningkatkan tabungan rumah tangga, memfasilitasi perdagangan barang dan mengubah distribusi pendapatan lokal (Osaki, 2003). Namun demikian diperlukan suatu analisis untuk mengetahui apakah kondisi ini juga terjadi di Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi migrasi internal dan internasional di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak penerapan kebijakan migrasi internal dan internasional terhadap pasar kerja dan perekonomian Indonesia pada tahun 2009-2012 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan perkembangan migrasi internal dan internasional, pasar kerja dan perekonomian Indonesia.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi internal dan internasional di Indonesia.
3. Meramalkan dampak penerapan kebijakan migrasi internal dan internasional terhadap pasar kerja dan perekonomian Indonesia pada tahun 2009 – 2012.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kebijakan tentang migrasi dalam rangka mengatasi masalah distribusi penduduk dan ketenagakerjaan yang bertujuan memperbaiki perekonomian Indonesia.
2. Sebagai bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mengkaji migrasi secara makro yang didisagregasi berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia, yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain. Oleh karena itu ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada migrasi internal, migrasi internasional, pasar kerja dan variabel-variabel permintaan agregat.
2. Migrasi internal merupakan migrasi keluar dan masuk dari satu pulau ke pulau lainnya di Indonesia. Migrasi internal dalam penelitian ini dibatasi pada migrasi masuk dari pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain ke Jawa; dan migrasi yang keluar dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain.
3. Tiga jenis migran internal yaitu migran semasa hidup, migran risen, dan migran total. Jenis migran internal dalam penelitian ini dibatasi pada migran semasa hidup (*life time migrant*).
4. Negara tujuan migrasi internasional Indonesia adalah kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika dan Eropa. Dalam penelitian ini, migrasi internasional dibatasi pada migrasi tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi,

Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Dasar pemilihan negara tujuan tersebut karena negara-negara tersebut yang paling banyak menggunakan jasa tenaga kerja Indonesia.

5. Perkembangan ekonomi dapat ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran agregat. Perkembangan ekonomi dalam penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel makroekonomi yang ditinjau dari sisi permintaan agregat, yaitu produk domestik regional bruto, total konsumsi rumah tangga, total investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih pada setiap pulau.
6. Kebijakan migrasi yang berjalan hingga saat ini merupakan kebijakan bersifat *direct policy* yang mengatur perpindahan penduduk berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, sedangkan dalam penelitian ini kebijakan migrasi yang digunakan mengutamakan *indirect policy* yang tidak mengatur jumlah perpindahan penduduk, tetapi lebih pada meningkatkan daya tarik daerah tujuan dengan upaya menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kondisi perekonomian di daerah tujuan. Oleh karena itu kebijakan migrasi difokuskan pada instrumen kebijakan makroekonomi yang mendorong terlaksananya kebijakan migrasi baik internal maupun internasional yang telah ditetapkan pemerintah.